

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa resistensi yang dilakukan oleh pekerja migran perempuan Indonesia merupakan bentuk strategi terselubung yang bersifat adaptif dalam menghadapi kekuatan struktural dan ketidakadilan dalam hubungan kerja. Dengan menggunakan teori resistensi James Scott, terlihat bahwa para pekerja migran perempuan secara konsisten menerapkan praktik-praktik resistif yang tidak eksplisit, seperti penolakan simbolik, kelambatan dalam pelaksanaan tugas, dan upaya negosiasi informal, guna merealisasikan kontrak kerja yang adil serta mengoptimalkan perlindungan hak-hak mereka. Strategi-strategi ini berakar pada kebutuhan untuk melindungi diri dari eksploitasi dan penindasan yang sering kali terjadi dalam sistem perekrutan dan penempatan kerja di luar negeri.

Teori resistensi James Scott mengungkapkan bahwa bentuk-bentuk perlawanan yang tidak tampak secara langsung sering kali menjadi satu-satunya cara bagi kelompok yang terpinggirkan untuk mempertahankan martabat dan hak mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa pekerja migran perempuan menggunakan "transkrip tersembunyi" sebagai medium untuk mengkomunikasikan ketidakpuasan dan keberatan mereka terhadap ketidakadilan dalam kontrak kerja. Walaupun tindakan-tindakan tersebut tampak sepele di permukaan, akumulasi dari resistensi kecil tersebut memiliki potensi untuk menggeser keseimbangan kekuasaan yang selama ini merugikan mereka.

Lebih jauh, analisis menunjukkan bahwa bentuk resistensi tertutup ini tidak hanya bersifat individual, melainkan juga kolektif. Melalui jaringan solidaritas antar sesama pekerja migran dan interaksi dengan kelompok-kelompok advokasi, praktik-praktik resistif ini membentuk basis kekuatan sosial yang memungkinkan mereka untuk secara tidak langsung mempengaruhi negosiasi dan penetapan kebijakan di tingkat makro. Kesadaran kolektif ini mendorong para pekerja untuk menuntut perbaikan dalam kontrak kerja dan meningkatkan standar perlindungan,

meskipun harus dilakukan dengan cara yang tidak mencolok agar tidak mengancam posisi mereka dalam struktur yang hierarkis.

Temuan penelitian juga mengindikasikan bahwa resistensi tertutup memainkan peran penting dalam menciptakan ruang bagi perbaikan kondisi kerja. Dengan mengadopsi strategi “everyday resistance”, para pekerja migran perempuan berhasil mengekspresikan keberatan mereka secara simbolis, sehingga memberikan sinyal kepada para pemberi kerja dan pembuat kebijakan tentang perlunya revisi terhadap sistem kerja yang ada. Tindakan-tindakan ini, meskipun terkesan pasif, telah membuka jalan bagi dialog lebih lanjut mengenai hak-hak pekerja dan perlunya mekanisme perlindungan yang lebih responsif terhadap kebutuhan mereka.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu agar pemerintah dan lembaga terkait segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi kontrak kerja bagi pekerja migran perempuan. Revisi regulasi tersebut harus dilakukan dengan partisipasi aktif dari perwakilan pekerja migran perempuan untuk memastikan bahwa setiap klausul kontrak kerja tidak memberatkan dan sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Pemerintah juga perlu memperkuat mekanisme pengawasan di lapangan, dengan menetapkan sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran kontrak kerja dan penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak pemberi kerja. Langkah-langkah ini penting untuk menciptakan iklim kerja yang adil dan menghargai martabat pekerja migran perempuan, sehingga mereka memiliki ruang yang lebih aman untuk mengekspresikan kebutuhan dan keberatan mereka.

Pemerintah juga perlu meningkatkan mekanisme pengawasan terhadap praktek perekrutan dan penempatan tenaga kerja migran, dengan fokus pada pelaksanaan dan implementasi kontrak kerja yang telah disepakati. Pengawasan ini hendaknya melibatkan lembaga-lembaga independen serta organisasi pekerja migran untuk memastikan bahwa setiap ketidaksesuaian atau pelanggaran dapat

diidentifikasi dan ditindaklanjuti secara cepat. Hal ini tidak hanya akan mengurangi praktik-praktik eksploitasi, tetapi juga memberikan sinyal bahwa perlawanan simbolik yang dilakukan pekerja migran dianggap serius oleh pihak berwenang.

Disarankan pula untuk memperkuat peran lembaga non-pemerintah seperti Migrant CARE dalam pendampingan dan pemberdayaan pekerja migran. Dukungan dari lembaga-lembaga ini dapat diwujudkan melalui pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan hukum yang intensif, yang semuanya harus disesuaikan dengan konteks resistensi tertutup yang dihadapi pekerja migran perempuan. Dengan adanya bimbingan dan pendampingan yang lebih intensif, para pekerja migran dapat lebih memahami hak-hak mereka serta strategi efektif untuk melawan ketidakadilan secara halus namun berkesinambungan.

Selanjutnya, peningkatan kapasitas pekerja migran perempuan melalui program pelatihan dan pendampingan hukum harus menjadi prioritas. Program tersebut hendaknya mencakup pendidikan mengenai hak-hak ketenagakerjaan, teknik negosiasi kontrak, serta pemahaman mendalam tentang peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Dengan adanya pendampingan hukum yang memadai, pekerja migran perempuan dapat lebih percaya diri dalam menghadapi kontrak kerja yang tidak adil dan mampu menolak syarat-syarat yang merugikan melalui strategi resistensi sehari-hari yang mereka terapkan, sebagaimana dijelaskan dalam teori James C. Scott. Selain itu, pemberian akses informasi melalui pusat layanan migrasi dan program literasi hukum harus diperluas agar seluruh pekerja migran dapat dengan mudah memperoleh pemahaman tentang mekanisme perlindungan yang tersedia.

Selanjutnya adalah perlunya peningkatan kolaborasi antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas pekerja migran untuk menciptakan forum dialog yang konstruktif. Forum ini dapat berfungsi sebagai wadah untuk menyuarakan aspirasi dan mengidentifikasi praktik-praktik resistensi yang dilakukan oleh pekerja migran perempuan, baik yang bersifat terbuka maupun tersembunyi. Pendekatan partisipatif ini diharapkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah mendasar dalam kontrak kerja serta mengusulkan solusi yang kontekstual. Kolaborasi lintas sektor juga penting dalam mengintegrasikan

perspektif gender dan keadilan sosial dalam setiap kebijakan migrasi dan ketenagakerjaan, sehingga reformasi yang dilakukan benar-benar berpihak kepada kelompok rentan.

Dengan demikian, melalui kombinasi pengakuan formal terhadap resistensi simbolik, pembaruan kontrak kerja, peningkatan mekanisme pengawasan, dan kolaborasi stakeholder, diharapkan kondisi kerja pekerja migran perempuan Indonesia dapat mengalami perbaikan yang signifikan. Implementasi rekomendasi tersebut tidak hanya akan mengoptimalkan perlindungan hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi pekerja untuk secara aman mengekspresikan aspirasi dan keberatannya terhadap praktik-praktik kerja yang tidak adil.



